



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **743956**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.650.000.000**

1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/62 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 421 m2/250 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 171 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 597.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000



3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.

4.500.000

4. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

30.000.000

5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 148.650.476

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 140.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.536.150.476

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.536.150.476

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.